

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Amanullah Naeni, 2015, *Demokratisasi Desa*, Jakarta Pusat, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Aditya Perdana, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenadamedia.

Gunarto Suhardi, 2006, *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.



Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru, Zanafa Publishing.

Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Marihot Manullang, 2005, *Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPF.

Terry E. Lawson, *Dalam Huraerah*, 2007.

Titon Slamet Kurnia, dkk, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka belajar.

Wiyono dan Isworo, 2007, *Kewarganegaraan*, Jakarta: Geneca Exact.

Jurnal

E.M. Nirahua Salmon, “*Problematika Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*”, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Unpatti, Vol. II Nomor 2 November 2010.



A Arief dan Rahmat Teguh Santoso Gobel, “*Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa terhadap Kewenangan Pengawasan*”

Pemilihan Kepala Desa”, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Vol. 19 Nomor 4 Desember 2022.

Ubaidillah Kamal, “*Politik Hukum Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca Amandemen UUD 1945)*”, Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Negeri Semarang 1, Nomor 1 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang perubahan tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan



Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentagn Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Amandemen Undang-Undang 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pertimbangan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa



Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa

Berita Acara

Laporan Dokumen Hasil Pelaksanaan Tahapan Akhir Panitia Pemilihan
Kepala Desa To'lemo Tahun 2019

